

PERANAN CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK MASYETA

Titus Ogoney¹

Abstrak

Pembangunan merupakan kebutuhan mutlak setiap daerah, keberhasilan pembangunan akan berdampak positif bagi kesejahteraan suatu wilayah. Kecamatan sendiri merupakan wilayah administratif yang dipercayakan untuk mengkoordinasikan pembangunan yang ada di desa/ kelurahan. Saat ini sangat di rasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat di buktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah terlebih khusus perintah kecamatan di mana tingkat keahlian dan pendidikannya masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui camat sebagai koordinator dalam menunjang keberhasilan pembangunan di distrik masyeta, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Distrik Masyeta Kepala Distrik melakukan koordinasi dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi dilakukan pada pegawai dan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan fisik, selain itu kepala distrik juga berkoordinasi dengan bupati dan SKPD terkait, telah terdapat beberapa pembangunan fisik yang dilaksanakan di Distrik Masyeta seperti, Kantor distrik, rumah jabatan camat, pembangunan barak, puskesmas, rumah para medis, gedung SD, SMP, gedung gereja dan jalan dari ibukota kabupaten.

Kata Kunci : Peranan, Camat, Pembangunan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

Pendahuluan

Pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan dalam proses pembangunan di kecamatan itu sendiri, seperti yang terjadi di Distrik Masyeta masih kurangnya peran aparat untuk mewujudkan dan peran sertanya dalam proses pembangunan kecamatan, serta sistem koordinasi yang lemah yang juga merupakan salah satu kendala yang cukup serius dalam pembangunan kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ayat 15 pasal 2, dikatakan Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, salah satu aspeknya adalah Koordinasi. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatakan Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Salah satu tugas camat adalah menyelenggaraan urusan pemerintahan umum mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; . mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan. dari hal tersebut terlihat bahwa peran camat dalam pembangunan adalah mengkoordinasikannya dengan pihak yang terkait baik itu kelurahan/desa, masyarakat dan dinas yang terkait.

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan desa dikepalai oleh seorang Camat, mempunyai tugas

pokok yaitu sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan kebebasan yang lebih luas khususnya bagi distrik yang merupakan sebutan lain dari Kecamatan di Papua. Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini telah membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah papua, terutama dalam hal praktik-praktik pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut menyangkut kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan. Perubahan tersebut mengubah bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personel, pemenuhan kebutuhan logistik, serta akuntabilitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari posisi kedudukan tugas dan kewenangan Distrik (kecamatan) tersebut dapat dikatakan distrik sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat melalui otonomi khusus papua. Distrik dalam hal ini menjadi tangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat luas di wilayah masing-masing distrik. Dalam hal ini distrik harus mampu menerjemahkan dan menyesuaikan berbagai kebijakan serta pelayanan yang sesuai dengan masyarakat. Oleh karena itu kecamatan diharapkan mampu mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya baik fungsi-fungsi koordinatif maupun pembinaan kepada pemerintahan desa dan kelurahan.

Dari pengamatan sementara penulis yang terjadi di Distrik Masyeta pelaksanaan pembangunan seperti jalan yang ada di Distrik Masyeta, pembuatan fasilitas umum seperti tempat sampah, pembangunan saluran air, pembuatan poskamling, belum berjalan secara maksimal terlihat dari lambatnya

pengerjaan, ketidakpastian waktu pelaksanaan sehingga menimbulkan pertanyaan dimasyarakat bagaimana koordinasi kepala distrik yang merupakan sebutan lain dari Camat di Papua dengan instansi terkait dan masyarakat. Dari berbagai permasalahan diatas, yang terjadi di Distrik Masyeta, Maka diangkat suatu judul yakni Peranan Kepala Distrik Sebagai Koordinator dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Distrik Masyeta

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut bagaimana peranan camat sebagai koordinator dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Distrik Masyeta? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui camat sebagai koordinator dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Distrik Masyeta.

Tinjauan Pustaka

Kata peranan ini sebenarnya menunjukan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya pemain sandiwara, tukang lawak. Kata "Peran" ini diberi akhiran "an" maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985:735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Peranan menurut Jack C. Plano, (2003:67) mengemukakan yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam "peranan" bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Otonomi khusus daerah papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 membawa implikasi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Camat menurut Bayu Suryaningrat (1981:2) adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Menurut Nugroho dan dahuri, (2004: 9).Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan marxis, modernisasi dan lain-lain. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utama yang

perlu diketahui dalam pembangunan yaitu :

1. Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah. Hal ini dapat diartikan
2. Terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan.
3. Mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Meskipun pengertian pembangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya masih ada titik temu atau kesepakatan yang terdapat dalam pengertian tersebut, antara lain sebagai berikut Sujadmoko (1971:3) memberikan pengertian bahwa pembangunan merupakan usaha penyesuaian dari diri suatu sosial secara keseluruhan pada aneka ragam masalah dan tantangan-tantangan baru dan proses demikian akan merupakan wujud sosial atau transformasi sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami

gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Gana, 1991 :32). Sesuai dengan judul serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

a. Koordinasi pembangunan dimaksudkan adalah kesatuan usaha atau kesatuan tindakan yang berkaitan dengan program pembangunan kecamatan (baik dalam perencanaan maupun implementasinya) yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah ditingkat kecamatan baik vertikal maupun horisontal atau dinas-dinas daerah, yang langsung dikoordinasikan oleh camat sebagai kepala wilayah atau administrator pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan dalam kaitan ini, maka indikator-indikatornya adalah :

1. Kesatuan gerak dari instansi yang ada baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi program (kerjasama antara camat dengan instansi lain seperti camat dengan koramil, camat dengan polsek)
2. Kesatuan dan keselarasan serta keserasian program
3. Kerjasama yang tercipta antara instansi yang ada serta antar instansi dengan pemerintah kecamatan serta masyarakat (kerjasama antara camat dengan bawahannya serta masyarakat)
- b. Keberhasilan pembangunan kecamatan dimaksudkan adalah tercapainya atau terselenggaranya program-program atau proyek-proyek pembangunan kecamatan baik yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah (vertikal maupun horisontal).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling. Purpose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi, 1987:157).

Hasil Penelitian

Sebuah organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada bawahan oleh pemimpin maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu bawahan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Aktivitas suatu organisasi berbeda dalam hal sejauh mana aktivitas unit lainnya kebutuhan akan suatu koordinasi tergantung pada persyaratan bentuk dan komunikasi tugas-tugas yang dilakukan dan tingkat ketergantungan berbagai sub unit yang melaksanakan tugas tersebut, (Joseph LC. Cheng dalam Djatmiko, 2008:62). Sedangkan Stoner dalam Djatmiko (2008:62) mengatakan koordiansi adalah proses pemanduan tujuan kegiatan unit-unit yang terpisah departemen atau bidang-bidang fungsional dalam suatu perusahaan secara efisien.

Pentingnya Koordinasi telah disadari sejak lahirnya peradaban dan budaya manusia. Dalam perkembangan kemudian, koordinasi tidak hanya diuraikan sebagai fungsi tetapi juga lembaga, bahkan perilaku dan teori organisasi. Koordinasi berkaitan awal dengan spesialisasi. Seperti diketahui, salah satu asas organisasi adalah spesialisasi. Sampai pada batas tertentu, spesialisasi dapat menciptakan efisiensi. Setiap spesialisasi dilembagakan menjadi sebuah kegiatan, program, lembaga, atau unit kerja, dengan sasaran spesifik pula. Penulis mewawancarai Kepala Distrik mengenai apa-apa saja pembangunan yang dijalankan di Distrik Masyeta, beliau menjawab pembangunan yang dijalankan terdiri dari infrastruktur umum seperti: Kantor distrik, rumah jabatan camat, pembangunan barak, puskesmas, rumah para medis, gedung SD, SMP, gedung gereja dan jalan dari ibukota kabupaten. Tugas saya sebagai camat adalah berkoordinasi dengan bupati dan semua SKPD terkait.

Pembagian Kerja merupakan langkah penting dalam melakukan koordinasi baik yang dilakukan Camat kepada perangkat-perangkat Kecamatan dan juga kepada organisasi yang ada di Kecamatan Masyeta dalam kerja sama. Keserasian dalam kerja sama dapat dilihat seperti saling pengertian, tindakan yang selaras dan kompak dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayah Kecamatan Masyeta. Untuk mengetahui apakah setiap pegawai di Kecamatan Masyeta mengetahui tugasnya masing-masing dapat dilihat melalui kutipan wawancara berikut: “Sebenarnya saya ini kalau pembagian tugasnya gampang-gampang saja. Saya menyuruh mereka bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka, itu ada diatur dalam Peraturan bupati. Disitu sudah ada jelas

tugas masing-masing pejabat eselon, Kasubag-Kasubag, Kasi-kasi, Camat, Sekcam sudah ada tugas, dan saya tindak lanjuti menggunakan jabatan fungsional umum, jadi semua pegawai yang tidak ada jabatan kalau dulu dibilang Staf sekarang tidak ada staf, sekarang jabatan fungsional umum, jadi setipa jabatan ini ada tugas masing-masing ada fungsional umum pengasuh barang, fungsional umum administrasi, fungsional umum sekretaris pimpinan dan itu bukan saya karang-karang itu sudah mengacu pada Peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara. Setelah ada jabatan fungsional umum kita susun SKP-nya (Sasaran Kinerja Pegawai). SKP ini sebagai kontrak MoU dia dengan atasan mereka masing-masing dan itu wajib. Dan itu kan terus kita benahi, kita evaluasi terus pelaksanaan ini. (Hasil Wawancara dengan Bapak Masyeta).

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap aparatur yang terdapat di Kecamatan Masyeta bekerja sesuai dengan SKP yang telah di tentukan bagi Pegawai dan Jabatan Fungsional Umum, dan tidak adanya tumpang tindih dalam setiap pekerjaan.

Penting dengan adanya pembagian tugas oleh camat, dari wawancara dengan pegawai Distrik Kepala Seksi Pemerintahan Bapak Anthon Kasihw mengatakan : ada pembagian tugas dan tanggung jawab, dalam organisasi tempat mereka bekerja, dengan alasan:

1. Tidak semua tugas dibebankan kepada atasan.
2. Supaya setiap individu yang bergabung dalam organisasi mereka tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya dan target organisasi dapat dicapai dengan maksimal.

Pertanyaan selanjutnya diarahkan kepada apakah ada pembagian tugas oleh atasan, Dari jawaban informan ibu

Siti salah satu pegawai Kantor kecamatan menyatakan bahwa : Dalam melaksanakan tugas, masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan bagian-bagian yang lain, dengan alasan :

1. Karena dalam melaksanakan tugas, masing-masing ditempatkan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
2. Karena jika tidak ada perbedaan tugas dan tanggung jawab untuk apa ada pembagian tugas dan tanggung jawab.
3. Agar kiranya tidak tumpang tindih. Ditambahkan juga beliau mengatakan peran Kepala Distrik dalam mengkoordinasikan dalam pembagian tugas cukup baik, Kepala Distrik selalu memerhatikan tugas dari setiap pegawainya.

Penulis juga mewawancarai seorang Kepala Desa Mestofu di Distrik Masyeta beliau mengatakan: dalam setiap rapat koordinasi di Distrik pak Kepala Distrik selalu membagi tugas setiap kepala-kepala desa terutama dalam pembangunan fisik yang sedang berjalan di setiap desa.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang hubungan kerja antara pegawai kecamatan dari jawaban bapak sekretaris Distrik Masyeta Bapak Kornelis Asmorom, S.ST menyatakan : bahwa ada hubungan kerja sama antara satu atau dua atau lebih dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam satu bagian dengan alasan, tanpa ada kerjasama yang baik antar sesama anggota bagian maka takakan mungkin target kesuksesan tugas dan tanggung jawab dicapai. Namun pernyataan sedikit berbeda dikatakan kepala seksi pemerintahan desa Bapak Rusdin menyatakan : bahwa kadang-kadang ada hubungan kerja sama antara satu atau dua atau lebih dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam satu bagian,

dengan alasan karena tidak semua tugas dibebankan kepada masing-masing bagian.

Selanjutnya sekretaris Distrik Bapak Kornelis Asmorom, S.St menyatakan perlu ada kerja sama antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam satu organisasi, dalam melaksanakan pekerjaan untuk tujuan organisasi, dengan alasan

1. Karena dalam organisasi kerja sama itu penting dalam rangka untuk mencapai satu tujuan.
2. Dengan adanya kerja sama ini tujuan yang hendak dicapai organisasi yang suda digariskan dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud.
3. Karena pada dasarnya organisasi pemerintahan Distrik merupakan satu sistem dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan.

Penulis menajukan pertanyaan kepada bapak Kepala Distrik Masyeta Yudas Masakoda, S.IP tentang perlunya keselarasan dalam organisasi beliau mengatakan bahwa : dalam melaksanakan tujuan organisasi diperlukan keselarasan antara tugas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/bagian yang satu dengan orang yang lain, dengan alasan

1. Hubungan yang selaras dan seimbang dalam organisasi diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.
2. Supaya dalam menjalankan tugas pekedaan tidak mengalami kesulitan. dalam melaksanakan tujuan organisasi diperlukan keselarasan antara tugas/ pekedaan yang dilakukan oleh seseorang/ bagian yang satu dengan orang yang lain karena bagian yang satu dengan yang lain pasti berbeda tugas dan tanggung jawab maka

pelaksanaan tugas pun kadang tidak selaras.

Tercapainya tujuan organisasi sangat diperlukan kerjasama dengan instansi yang lain dari pertanyaan mengenai hal tersebut Bapak Kepala Distrik menyatakan: dalam melaksanakan tujuan organisasi perlu adanya keda sama dengan instansi lain, dengan alasan :

1. Karena untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi perlu diadakan kerja sama agar tujuan bisa tercapai.
2. Setiap ada pelaksanaan organisasi harus di rekomendasi oleh instansi.

Selanjutnya penulis mewawancarai salah seorang kepala desa Kali Biru di Distrik Masyeta untuk mengetahui peran Kepala Distrik dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di Distrik, menurut beliau : Pak Kepala Distrik dalam pembangunan fisik di Distrik seperti pembangunan drainasi, jembatan, jalan selalu mengkoordinasikan dengan kami sebagai kepala desa, beliau meninjau dan mendengar aspirasi masyarakat, apabila hal tersebut bisa dikerjakan dengan kerja bakti, maka pak Kepala Distrik memerintahkan untuk mengadakan kerja bakti, namun apabila memerlukan dana yang besar, biasanya dikoordinasikan dulu ke tingkat kabupaten. Hal senada dikatakan oleh Bapak Lukas seorang masyarakat di desa beliau mengatakan : pembangunan fisiki di desa contohnya didesa, pembangunan jembatan ini dikoordinasi langsung oleh pak Kepala Distrik, dimana beliau selaku pimpinan Distrik menerima aspirasi dari kami yang memerlukan jembatan yang menghubungkan dengan desa yang lain. Hal senada dikatakan oleh Ibu. Christin seorang masyarakat di Distrik Masyeta beliau mengatakan : peran Kepala Distrik sebagai koordinator dalam

pembangunan bisa terlihat dalam pembangunan Distrik di desa kami, peran beliau dalam menghubungkan dengan satu pihak dengan pihak yang lain sangat berperan.

Kecamatan dengan pihak yang terkait dalam membahas dan memecahkan masalah dalam yang dihadapi dan usulan-usulan dari tim dapat disampaikan sebagai bahan untuk pertimbangan bagi tim dalam menjalankan tugas. Rapat juga berguna agar antara pegawai tercipta hubungan yang terkait dan jelas secara keseluruhan yang dapat mendorongnya koordinasi yang baik. Selain itu dengan adanya pertemuan rapat juga dapat mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Koordinasi yang baik memerlukan rapat. Untuk melihat keefektifitasan rapat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: “Kalau di kecamatan rapat koordinasi itu setiap hari senin. Kalau musrembang itu sekali setahun.” (Hasil wawancara dengan Kasi. Pemerintahan). Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pertemuan rapat di Kecamatan Masyeta tersusun dengan baik. “masalah apa yang terjadi di desa-desa itu jadi dirampung dulu di tampung aspirasinya, seumpamanya di desa ini desa Masyeta apa masalahnya, di desa aliantan apapun masalahnya seperti itulah di desa-desa apa permasalahannya di seksi-seksi apa masalahnya, di kesehatan seumpannya, dipertanian, di pendidikan apa permasalahannya dirampung dia, jadi kalau ada rapat kembali kita lihat apa permasalahannya kita bicarakan baru kita cari solusinya, kalau bisa kita datangkan dari kabupaten kita datangkan. Rapat koordinasi sudah dilakukan sejak seminggu dia (Camat) disini dilakukan Rapat Koordinasi. (Hasil wawancara dengan Kasi. Pemerintahan).

Dari hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan untuk membahas segala permasalahan dalam pembangunan sesuai dengan prosedur yang telah ada dan terstruktur serta melibatkan unsure-unsur yang terkait. Serta setiap aparatur yang diundang dalam rapat berhak menyampaikan setiap permasalahan yang ada di Desa mereka masing-masing. Berbagai sebutan buat koordinasi. Misalnya Koordinasi Horizontal, Koordinasi Vertikal, dan Koordinasi Diagonal. Tetapi dari sudut manajemen, koordinasi diidentifikasi melalui ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Dari sudut pandang ini, identifikasi beberapa bentuk koordinasi, seperti :

1. Koordinasi Waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan, jika berurutan, bagaimana urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya.
2. Koordinasi Ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi Interinstitusional. Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.
4. Koordinasi Fungsional. Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.
5. Koordinasi Struktural. Yaitu koordinasi antar unit kerja yang

berada dibawah struktur tertentu tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.

Dalam proses, pembangunan diwilayah Distrik, fungsi aparat pemerintah merupakan pelaksanaan pembangunan diwilayah ini. Fungsi ini sejalan dengan kedudukan aparat pemerintah Distrik, dimana sedikit banyak usaha aparat pemerintah untuk menggalang potensi pembangunan yang ada di Distrik adalah tergantung pada sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh aparat Distrik.

Peran serta masyarakat pada umumnya tertentu tidak akan lepas dalam kaitan ini, karena tanggung jawab pembangunan tidak hanya sernata-mats berada ditangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Seorang informan masyarakat Masyeta Bapak Timotius menyatakan : bahwa pembangunan yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar, terlihat dengan beberapa pembangunan jalan Distrik, jalan desa, drinase, jembatan sudah terlihat meskipun belum sudah berjalan maksimal setidaknya sudah ada pembangunan yang terlihat.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Trantib Bapak Thomas Ogoney beliau mengatakan : Perencanaan pembangunan di tingkat Distrik berjalan secara partisipatif yakni dari tingkat desa/kelurahan yakni musrenbang desa dan dilanjutkan ke tingkat Distrik, dari hasil-hasil tersebut dibawa ditingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut, dan dapat dilihat sebagian usulan pembangunan telah dan sementara direalisasikan.

Pembangunan fisik yaitu pembuatan, jembatan, jalan, balai desa

dan lain-lain. Dalam rangka pembangunan ditingkat Distrik terdapat 4 (empat) urutan rangkaian kegiatan secara berkelanjutan dari tahun ketahun untuk mendorong usaha percepatan pencapaian pembangunan. Adapun pentahapan proses pembangunan ditingkat Distrik adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Tahap evaluasi pelaksanaan program/ proyek pembangunan.
4. Tahap penetapan dan pelaksanaan tindak lanjut untuk membina dan mengembangkan hasil pembangunan.

Dari tahap-tahap tersebut diatas, titik berat yang akan disoroti adalah tahap perencanaan yang dikaitkan dengan sejauh mana peranan aparat pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan diwilayah Distrik Masyeta.

Secara konsepsional perencanaan ditingkat Distrik adalah penentuan pilihan atas menentukan urutan tindakan secara nyata dan sadar dalam jangka waktu tuntutan atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat (kebutuhannya) dengan memperhitungkan biaya, tenaga bahan secara efisien dan rasionalisme mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Disamping itu yang menjadi tujuan perencanaan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari segala komponen perencanaan untuk mencapai hasil secara optimal.

Suatu keberhasilan pembangunan, dihasilkan dari perencanaan yang baik juga. Perencanaan merupakan proses penyusunan bagaimana menempuhnya atau proses indikasi kemana tujuan akan dituju serta bagaimana menempuh tujuan tersebut. Camat melakukan perencanaan pembangunan bersama dengan perangkat-perangkat

Kecamatan. Hal ini didukung oleh wawancara peneliti:

“Dengan banyak cara, ada yang turun kemasyarakat, turun kedesa dan ada juga melalui rapat koordinasi dipanggil itu Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan BPD, termasuk juga Pemuda, namun untuk Pemuda itu dilapangan tapi kalau rapat koordinasi dengan Kepala Desa. Setelah itu kita turun kelapangan baik menengok objeknya langsung maupun melalui temu ramah atau juga melalui silaturahmi. Habis itu melalui jalur formal direncanakan yaitu melalui Musrembang. Kalau di tingkat Desa melakukan musyawarah Pak Kasi Pemerintahan Desa saya suruh turun dan saya juga turun kesana, tapi karena waktu saya terbatas selebinya saya serahkan ke Kasi Pemerintahan Desa.” (Wawancara dengan Camat Masyeta).

“Kalau merencanakan pembangunan di Kecamatan Masyeta ini, ini dilingkungannya? Kalau di Merencanakan pembangunan di Kecamatan yang ikut merencankannya Camat bersama jajarannya, para Unsur Pimpinan Kecamatan, Kasi, Kepala UPTD, Kepala Desa. Kalau Tokoh Masyarakat yaitu Pendeta, Kepala Suku, Tokoh Adat. Dan lain-lainnya seperti masyarakat, Ormas, Karang Taruna. Jadi Perencanaan pembangunan itu awalnya Musrembang dari Desa, Musrembangdes namanya. Musrembangdes itu dihimpun seluruh aspirasi usulan seluruh dari seluruh desa, Kepala jaga dan lainnya itu nanti dikumpulkan di Kecamatan dan setelah itu Kecamatan membuat Musrembang Kecamatan. Jadi Musrembang ini kuncinya.” (Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Masyeta).

“Merencanakan pembangunan dalam bentuk rapat dan dituangkan dalam seperti musrembang, musrembang ini

ada tingkatannya yang pertama itu dari murembang desa, masing-masing desa menyapaikan usulannya setelah desa mengadakan musrembang baru nanti di Kecamatan. Semua pembangunan entah apapun yang diminta oleh masyarakat tercantum disitu (Musrembang) dan di terima oleh Kasi Pemerintahan Desa. Memang ujung tombaknya nanti semua kesini di tuangkan (di Kecamatan). Setelah itu Camat berkoordinasi dengan pihak Kabupaten. Yang ikut dalam perencanaan Masyarakat, Kepala Suku, Dinas Perencanaan, Polsek, UPTD, Kepala Desa, Dispora, KNPI, Karang Taruna.” (Wawancara dengan Kasie. Umum).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Camat melakukan atau merencanakan setiap pembangunan yang ada di Kecamatan Masyeta berkoordinasi dalam bentuk Musyawarah Pembangunan (Musrembang) kepada setiap unsur-unsur yang terkait untuk dapat menentukan skala prioritas yang akan di bangun di Kecamatan Masyeta. Perencanaan suatu pembangunan perlu melibatkan semua unsur agar tidak adanya simpang siur informasi

Antara koordinasi dan keberhasilan pembangunan mempunyai hubungan yang erat, dimana dengan adanya koordinasi dapat menunjang keberhasilan pembangunan.

Selaku pelaksana yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Distrik aparat pemerintah adalah pejabat yang melakukan koordinasi. Untuk men . amin keteraturan dalam proses pembangunan, koordinasi mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan pembangunan untuk mencapai daya guna, dan. hasil guna.

Disamping itu juga dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan koordinasi yang menyeluruh supaya proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar, dan hasilnya tidak hanya dirasakan oleh sekelompok orang tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal diatas ditunjang oleh beberapa informan yang diwawancarai oleh penulis seperti pak Kepala Distrik Masyeta Bapak Yudas Masakoda, S.IP beliau mengatakan : hubungan koordinasi dengan keberhasilan pembangunan sangatlah erat, karena tanpa adanya koordinasi dengan pihak-pihak tertentu terutama atasan dan bawahan, pemerintah dan masyarakat, pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik, sebaliknya meskipun ada beberapa kendala namun apabila komunikasi dan koordinasi yang baik, maka setiap permasalahan dapat diselesaikan dan pembangunan dapat berhasil.

Hal senada dikatakan oleh seorang Kepala desa Mesomda di Distrik Masyeta beliau mengatakan : koordinasi sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, di Distrik Masyeta, koordinasi Kepala Distrik dengan para pegawai Distrik serta kepala desa sangat menentukan keberhasilan beberapa pembangunan di Distrik seperti pembangunan jembatan, jalan desa dan lainnya.

Dari informan masyarakat Ibu Olvi mengatakan: seharusnya ada koordinasi dalam suatu pembangunan tanpa hal tersebut, kami sebagai masyarakat tidak akan bergerak untuk menunjang keberhasilan pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Di Distrik Masyeta Kepala Distrik melakukan koordinasi dengan baik

dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi dilakukan pada pegawai dan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan fisik, selain itu kepala distrik juga berkoordinasi dengan bupati dan SKPD terkait.

2. Telah terdapat beberapa pembangunan fisik yang dilaksanakan di Distrik Masyeta seperti, Kantor distrik, rumah jabatan camat, pembangunan barak, puskesmas, rumah para medis, gedung SD, SMP, gedung gereja dan jalan dari ibukota kabupaten
3. Dalam melaksanakan pembangunan di Distrik Masyeta ada kerja sama antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam suatu organisasi karena kerjasama itu penting dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kerjasama tujuan yang hendak dicapai organisasi yang sudah digariskan dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud, dan pada dasarnya organisasi pemerintahan Distrik merupakan satu system dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu keutuan yang tidak terpisahkan hal ini terlihat di Distrik Masyeta.

Saran

1. Koordinasi tidak boleh diabaikan dalam suatu proses pembangunan, maka Kepala Distrik sebagai koordinator dalam pembangunan dtitingkat Distrik perlu meningkatkan hubungan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Distrik baik vertical maupun horizontal, demi tercapainya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Demi menghindari terjadinya kekacauan dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun

pemerintahan di Distrik disarankan Kepala Distrik selain mengadakan koordinasi dengan bawahan perlu juga ada pengawasan melekat demi memastikan keberlangsungan dari setiap perintah yang dijalankan.

3. Perlunya diadakan pertemuan yang rutin dan berkala dengan organisasi lain maupun dengan kepala-kepala desa yang ada di Distrik untuk membahas pelaksanaan program serta mengkoordinasikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1979. Kerangka Pokok-Pokok Management Umum. Jakarta Ikhtiar Baru.
- Beratha I Nyoman, 1982. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Bintoro Tjokroamojo, 1984. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
- Handyaningrat Soewarno, 1982, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Komaruddin, 1979, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alumni
- Koentjaraningrat, 1985, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta. Gramedia
- Liang Gie, 1978, Pengertian Kependudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, Yogyakarta, Karya Kencana
- Moekijat, 1994, Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis), Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Nitisemito dan Hazil, 1977, Manajemen Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Nugroho Iwan dan R. Dahuri, 2004, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan, Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI
- Poerwadaraminta, W.J.S. 1985 Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka
- Purwanto dkk, 1978, Administrasi Pendidikan, Jakarta, Mutiara
- Siagian, S.P. 1978, Peranan Staf dalam Manajemen, Jakarta, Gunung Agung
- Siagian S.P, 1984, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Penerbit Gunung Agung
- Sujadmoko, 1971, Problem dan Proses Pembangunan Indonesia, Jakarta, Prisma
- Suryaningrat. B, 1989, Perumuaan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara.
- Syarifuffin , Ateng, 1976, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Bandung: Tarsito
- Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I), Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Y.W. Sunindhia SH. Dan Dra. Ninik Widijanti, 1987, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Penerbit: PT. Bina Aksara.
- Westra Pariata, 1983, Ensiklopedi Administrasi, Jakarta, Gunung Agung
- _____ 1983, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- _____ 1984, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Gunung Agung Jakarta.